



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
UNIT KERJA : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRVAN ARYANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 768472

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 771.350.000

1. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 46.350.000
2. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/126 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HIBAH TANPA AKTA Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 150.000.000

1. MOBIL, NISSAN XTRAIL 2.5 ST AT Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOBIL, NISSAN MARCH 1.2 (4X2) M/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 14D(AL115C/MIO SOUL) Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 93.799.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 105.859.979**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 1.121.008.979**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.121.008.979

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.